



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS HARTANTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **468942**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>868.500.000</b>
1. Tanah Seluas 526 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 53.000.000		
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.500.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , Rp. 565.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/40 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>149.700.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.200.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 F VARIO 125 F Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 121.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>24.320.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.436.664</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.052.956.664</b>



III. HUTANG

Rp. 231.891.083

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 821.065.581

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.